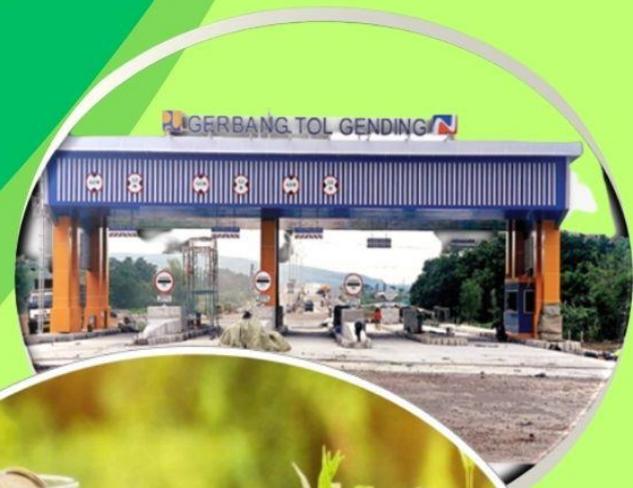


PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PROBOLINGGO

Menurut Pengeluaran

2018-2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PROBOLINGGO Menurut Pengeluaran 2018-2022

<https://probolinggo.kab.bps.go.id>



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Pengeluaran 2018-2022

Katalog BPS : 9302020.3513
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xvi + 72 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"

TIM PENYUSUN / DRAFTING TEAM

Penanggungjawab Umum/*General in Charge* :

Ir. Firman Bastian, M.Si

Penanggungjawab Teknis/*Technical in Charge* :

Achmad Nurochman, SE

Penulis/*Writer* :

Mokhammad Haris, S.Si, M.AP

Pengolah Data/*Data Processor* :

Achmad Nurochman, SE

Mokhammad Haris, S.Si, M.AP

Penyunting/*Editor* :

Achmad Nurochman, SE

Infografis dan Tata Letak/*Infographics and Layout*

Mokhammad Haris, S.Si, M.AP

Gambar Kulit/*Cover Design* :

Mokhammad Haris, S.Si, M.AP

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Probolinggo, April 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Probolinggo,



Ir. FIRMAN BASTIAN, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Infografis	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	6
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	16
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	18
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor - Impor	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2018-2022	27
3.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran	29
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	37
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	38
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	44
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	46
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	48
3.2.5 Perubahan Inventori	50
3.2.6 Ekspor Netto Barang dan Jasa	51

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN PROBOLINGGO 2018-2022	53
4.1	PDRB (Nominal)	55
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	56
4.3	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	57
4.4	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	58
BAB V	PENUTUP	61
	LAMPIRAN	65

<https://probolinggokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	30
Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	31
Tabel 3.3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	34
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	35
Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	37
Tabel 3.6. Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	37
Tabel 3.7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	39
Tabel 3.8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	41
Tabel 3.9. Pertumbuhan Riil Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	43
Tabel 3.10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	44
Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	45
Tabel 3.12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	47
Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	49
Tabel 3.14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	51
Tabel 3.15. Perkembangan Ekspor Netto Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	52

Tabel 4.1.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	55
Tabel 4.2.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	57
Tabel 4.3.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	58
Tabel 4.4.	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	59

<https://probolinggokab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran (Miliar Rupiah), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	30
Gambar 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Miliar Rupiah), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	32
Gambar 3.3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	33
Gambar 3.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022.....	34
Gambar 3.5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Persen), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018-2022.....	67
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018-2022.....	68
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018-2022.....	69
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018-2022	70
Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018-2022	71
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018-2022	72

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PROBOLINGGO 2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi
4,52%

PDRB ADHB
38,93 triliun rupiah

PDRB ADHK 2010
24,73 triliun rupiah

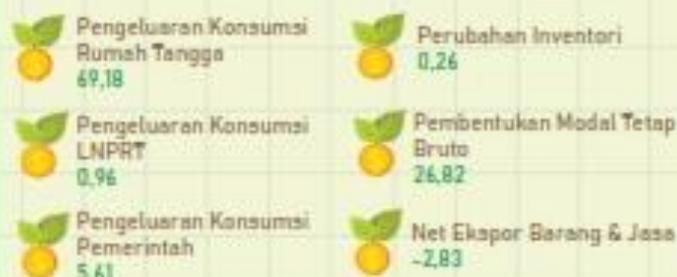
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PROBOLINGGO 2010-2022 (persen)



PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN (persen)



STRUKTUR PDRB MENURUT KOMPONEN PENGELUARAN (persen)



PENDAHULUAN

BAB I

<https://probolinggokab.bps.go.id>



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini, seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*industry*). Meskipun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Net Ekspor Barang dan Jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga, serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

- Disebut sebagai pendekatan “riil”

- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “*output akhir (final output)*”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut.

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur, atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang

dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah pada setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara

China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasikan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun dasar 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan, dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa manfaat perubahan tahun dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB di antaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;

- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa implikasi perubahan tahun dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi, dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 di antaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh: nilai tegakan padi, kelapa sawit, dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). RnD merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri yang melakukannya dan PMTB seperti RnD tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer *software* (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri yang melakukannya dan PMTB.

h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari *output* industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. *Output* kategori ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan Metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *International Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2020 dan KBKI 2013.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

BAB II

<https://probolinggoregional.go.id>



2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB Pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau, dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*); Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain; dan
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh nonresiden, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti: barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per kapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan);
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan);
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai *output* non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai *output* non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lain.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

iv. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-LNPRT adalah:

- a. Survei Khusus Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNPRT), BPS
- b. SK-LNPRT Triwulanan (SK-LNPRT), BPS
- c. Hasil *updating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut:

1. Menghitung nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNPRT;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNPRT seperti: jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai *output* dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan

pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan DPPKAD
- Statistik Keuangan Daerah, BPS
- Output* Bank Indonesia, Bank Indonesia
- Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan DPPKAD
- Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\begin{aligned} \text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = & \textit{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \textit{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \textit{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Catatan:

PK-P atas dasar harga konstan diestimasi dengan *men-deflate* PK-P atas dasar harga berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bantuan Sosial	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Output BI</i>		Neraca Jasa

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan (*Cultivated*

Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- b. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- c. Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- d. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- e. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- f. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum, BPS
- g. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

h. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode Estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sementara itu, pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak
atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor
+ Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan *Supply* : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total *Supply* Barang x
Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar
harga konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, dan

gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang, yakni sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/ BUMD, Data Sekunder dari luar BPS;
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;

6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjenak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = (\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}) \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6. EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang

memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan Definisi

Ekspor-Import didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Import dari luar provinsi/kabupaten/kota

Selisih antara ekspor dan import didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-import wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan import dengan menggunakan metode tidak langsung.

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN PROBOLINGGO BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2018-2022

BAB III



Aktivitas pembangunan ekonomi di Kabupaten Probolinggo selama periode 2018 sampai dengan 2022 telah mengakibatkan pergeseran struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 juga sangat berpengaruh terhadap dinamika perekonomian global, termasuk di Kabupaten Probolinggo.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Probolinggo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Adapun untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

Sejak tahun 2015 PDRB menurut Pengeluaran sebagaimana halnya PDRB menurut lapangan usaha diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Adapun selama tahun 2018-2022 perekonomian Kabupaten Probolinggo selalu menunjukkan tanda peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020 menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi, dan berangsur mengalami perbaikan pada tahun 2021-2022. Hal ini terlihat dari nilai pertumbuhan ekonominya yang selalu menunjukkan arah positif hingga tahun 2019 atau terjadi peningkatan, serta di tahun 2020 yang tumbuh negatif akibat terkontraksi. Peningkatan atau penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan 2010 (ADHK), serta pertumbuhan total. PDRB ADHB Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 secara total meningkat sebesar 9,34 persen dibandingkan tahun

2021, yakni dari 35.605,52 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 38.932,78 miliar rupiah pada tahun 2022.

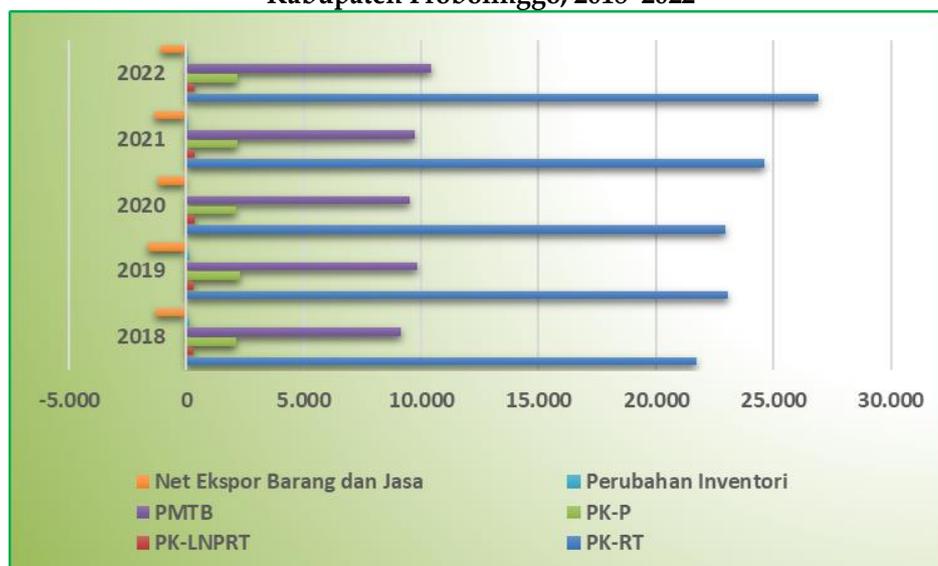
Sedangkan jika dinilai atas dasar harga konstan 2010 (ADHK), nilai PDRB Kabupaten Probolinggo tahun 2022 sebesar 24.734,19 miliar rupiah, meningkat 4,52 persen dari tahun 2021 yang sebesar 23.664,39 miliar rupiah. Baik ADHB maupun ADHK, nilai PDRB Kabupaten Probolinggo pada periode 2018-2022 terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan (kontraksi) akibat pandemi Covid-19.

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

(Miliar Rp.)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	21.697,20	23.080,39	22.930,71	24.610,45	26.932,82
2. Konsumsi LNPRT	303,28	325,74	331,99	343,46	373,64
3. Konsumsi Pemerintah	2.095,36	2.278,18	2.103,73	2.184,45	2.186,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.130,96	9.834,85	9.517,56	9.707,78	10.441,74
5. Perubahan Inventori	116,38	121,76	56,94	94,93	100,01
6. Ekspor Netto	-1.330,96	-1.627,26	-1.219,86	-1.335,53	-1.101,46
Total PDRB	32.012,21	34.013,66	33.721,07	35.605,52	38.932,78

Gambar 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran (Miliar Rupiah), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022



Pada periode tahun 2018-2022 nilai PDRB Kabupaten Probolinggo atas dasar harga berlaku berturut-turut sebesar 32.012,21 miliar rupiah (2018); 34.013,66 miliar rupiah (2019); 33.721,07 miliar rupiah (2020); 35.605,52 miliar rupiah (2021); dan 38.932,78 miliar rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan volume (jumlah) produksi dan adanya andil faktor inflasi. Peningkatan PDRB sisi produksi tentunya dipicu oleh adanya peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB ADHB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Probolinggo pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1 di atas.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi/dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun akan memberikan gambaran tentang perubahan PDRB hanya secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Probolinggo pada periode 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.2 berikut.

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

(Miliar Rp.)					
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	15.517,98	16.116,79	15.876,63	16.639,34	17.407,46
2. Konsumsi LNPRT	181,09	190,63	191,74	196,69	207,39
3. Konsumsi Pemerintah	1.197,42	1.253,90	1.215,04	1.219,14	1.265,58
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.415,04	6.729,34	6.416,88	6.389,66	6.635,70
5. Perubahan Inventori	70,10	72,34	33,47	54,51	55,90
6. Ekspor Netto	-1.007,05	-967,75	-835,52	-834,95	-837,85
Total PDRB	22.374,57	23.395,25	22.898,24	23.664,39	24.734,19

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan selama 2018-2019, yakni dari sebesar 22.374,57 miliar rupiah (2018) dan 23.395,25 miliar rupiah (2019). Namun pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Probolinggo mengalami kontraksi hingga turun menjadi 22.898,24 miliar rupiah. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang melemahkan sebagian besar aktivitas ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Kemudian pada tahun 2021-2022, kegiatan ekonomi sudah berangsur-angsur pulih seiring adanya kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat, bahkan penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022.

Seiring dengan nilai PDRB yang fluktuatif pada periode 2018-2022 akibat pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama juga mengalami fluktuasi. Pada periode 2018-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo selalu tumbuh positif, yakni 4,47 persen (2018) dan 4,56 persen (2019). Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo mengalami kontraksi sebesar 2,12 persen. Kemudian pada periode 2021-2022, pulihnya aktivitas masyarakat mampu mendorong perekonomian Kabupaten Probolinggo tumbuh positif sebesar 3,35 persen (2021) dan 4,52 persen (2022). Kembalinya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo di atas empat persen pada tahun 2022 menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Probolinggo sudah pulih dan bangkit kembali sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Gambar 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi (Persen), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022



Perubahan volume ekonomi akan tercermin dengan akurat baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*) melalui angka pertumbuhan ekonomi. Dari sisi produksi, peranan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai lebih dari 30 persen. Sementara pertumbuhan pada tahun 2022 tertinggi berada pada kategori Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 16,51 persen. Sedangkan dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo masih sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari dua per tiga dari total PDRB setiap tahunnya.

Nilai PDRB ADHB yang pada umumnya lebih besar dari nilai PDRB ADHK dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Gambar 3.3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022



Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor atas barang dan jasa.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

(persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,78	67,86	68,00	69,12	69,18
2. Konsumsi LNPRT	0,95	0,96	0,98	0,96	0,96
3. Konsumsi Pemerintah	6,55	6,70	6,24	6,14	5,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,52	28,91	28,22	27,26	26,82
5. Perubahan Inventori	0,36	0,36	0,17	0,27	0,26
6. Ekspor Netto	-4,16	-4,78	-3,62	-3,75	-2,83
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Komponen Pengeluaran (Persen) Kabupaten Probolinggo, 2018-2022



Selama periode 2018-2022 PDRB Kabupaten Probolinggo yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) hampir mencapai 70 persen, yakni sekitar 67,78 persen hingga 69,18 persen dengan tren yang berfluktuasi (berdasarkan Tabel 3.3). Pengeluaran konsumsi rumah tangga selalu menjadi komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan masyarakat

melalui aktivitas konsumsinya sangat vital dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Probolinggo. Sedangkan pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masih mempunyai kontribusi terbesar kedua, yakni sekitar 26,82 persen sampai dengan 28,91 persen. Komponen ekspor netto selama tahun 2018-2022 selalu menunjukkan nilai negatif, yang berarti bahwa nilai barang/jasa yang diekspor keluar wilayah Kabupaten Probolinggo selalu lebih kecil dibandingkan nilai impor yang masuk. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan domestik Kabupaten Probolinggo masih harus dipenuhi oleh produk barang/jasa yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

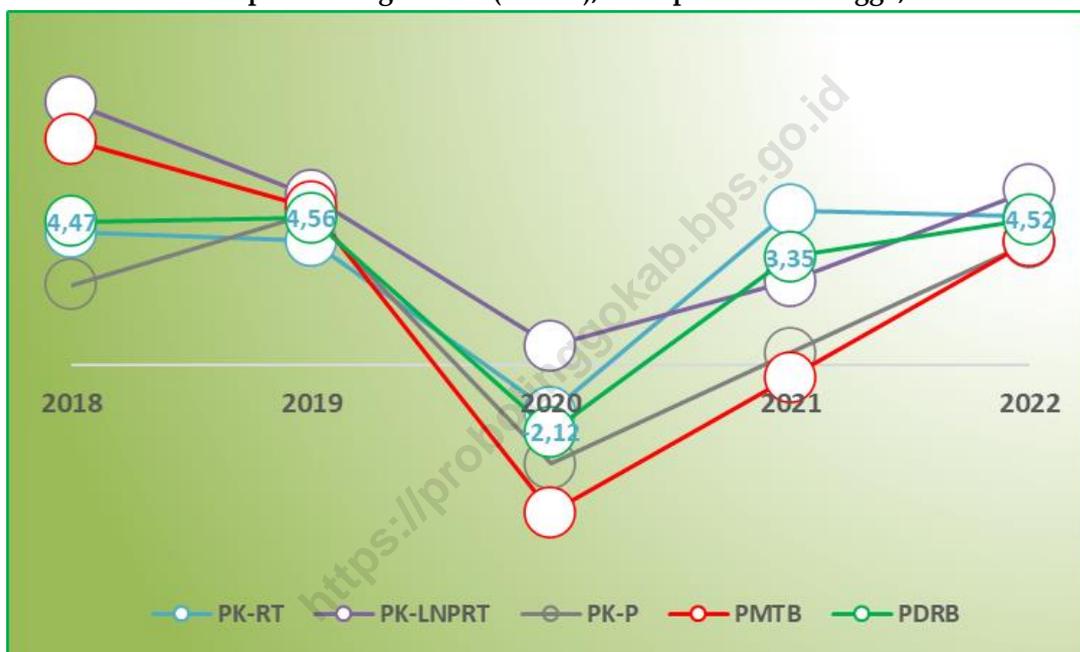
Selama periode 2018-2022 kontribusi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 5,61 persen hingga 6,70 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam mendorong penciptaan PDRB tidak terlalu besar. Bahkan dalam periode empat tahun terakhir (2019-2022), persentase kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah terus mengalami penurunan. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membuat anggaran belanja pemerintah selalu mengalami penghematan dan *refocusing* untuk penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, kontribusi konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) jauh lebih kecil dibanding komponen lainnya, yaitu sekitar 0,95 persen hingga 0,98 persen.

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Probolinggo, 2018- 2022

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,11	3,86	-1,49	4,80	4,62
2. Konsumsi LNPRT	8,17	5,27	0,58	2,58	5,44
3. Konsumsi Pemerintah	2,49	4,72	-3,10	0,34	3,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,02	4,90	-4,64	-0,42	3,85
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Netto	-	-	-	-	-
PDRB	4,47	4,56	-2,12	3,35	4,52

Indikator agregat makro lain yang bisa diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.4, selama periode tahun 2018-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami fluktuasi, yakni dari angka 4,47 persen (2018); 4,56 persen (2019); -2,12 persen (2020); 3,35 persen (2021); dan 4,52 persen (2022).

Gambar 3.5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Persen), Kabupaten Probolinggo, 2018-2022



Untuk menggambarkan besarnya perubahan harga antar waktu yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi maupun investasi, maka digunakan parameter indeks implisit PDRB pengeluaran. Dari Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 terlihat tingkat kecepatan kenaikan harga yang dimulai dari tahun dasar (2010=100) selama periode tahun 2018-2022, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Secara umum selama periode 2018-2022 pertumbuhan indeks harga implisit terus mengalami peningkatan kurang dari lima persen.

**Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Komponen Pengeluaran,
Kabupaten Probolinggo, 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	139,82	143,21	144,43	147,91	154,72
2. Konsumsi LNPRT	167,47	170,87	173,15	174,62	180,16
3. Konsumsi Pemerintah	174,99	181,69	173,14	179,18	172,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	142,34	146,15	148,32	151,93	157,36
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Netto	-	-	-	-	-
PDRB	143,07	145,39	147,26	150,46	157,40

**Tabel 3.6. Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Komponen Pengeluaran,
Kabupaten Probolinggo, 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,63	2,42	0,85	2,41	4,61
2. Konsumsi LNPRT	2,57	2,03	1,33	0,85	3,17
3. Konsumsi Pemerintah	9,09	3,83	-4,70	3,49	-3,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,89	2,68	1,49	2,43	3,57
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Netto	-	-	-	-	-
PDRB	2,28	1,62	1,29	2,17	4,62

3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Struktur perekonomian suatu wilayah akan selalu berubah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu dan tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode

tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah, serta sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Probolinggo untuk periode 2018-2022.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Probolinggo, sebagian besar di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Probolinggo maupun produk impor yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga (masyarakat) memiliki peranan yang sangat vital dalam aktivitas perekonomian.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama, dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2018 sampai dengan 2022 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sehingga pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp.)	21.697,20	23.080,39	22.930,71	24.610,45	26.932,82
b. ADHK 2010 (Miliar Rp.)	15.517,98	16.116,79	15.876,63	16.639,34	17.407,46
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	67,78	67,86	68,00	69,12	69,18
Rata-rata Konsumsi per Rumah Tangga (Ribu Rp.)					
a. ADHB	66.458,17	70.256,09	70.587,75	75.481,76	82.343,72
b. ADHK 2010	47.531,33	49.059,07	48.873,11	51.033,87	53.221,14
Rata-rata Konsumsi per Kapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB	18.670,81	19.742,00	19.910,80	21.291,27	23.218,65
b. ADHK 2010	13.353,49	13.785,62	13.785,72	14.395,21	15.006,89
Pertumbuhan:					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	4,11	3,86	-1,49	4,80	4,62
b. Per Rumah Tangga	3,47	3,21	-0,38	4,42	4,29
c. Per kapita	3,50	3,24	0,00	4,42	4,25
Jumlah Rumah Tangga (unit)	326.479	328.518	324.854	326.045	327.078
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.162.092	1.169.101	1.151.672	1.155.894	1.159.965

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018 sampai 2022 cenderung meningkat. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 69,18 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 67,78 persen. Selama periode 2018-2022 besaran proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berturut-turut sebesar 67,78 persen (2018); 67,86 persen (2019); 68,00 persen (2020); 69,12 persen (2021); dan 69,18 persen (2022).

Pada masa ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, biasanya secara otomatis institusi rumah tangga berusaha memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat belum sepenuhnya membaik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik masih rendah. Kondisi semacam ini memicu turunnya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Namun demikian selama periode 2018-2022 peningkatan konsumsi rumah tangga masih lebih tinggi dibandingkan komponen yang lainnya, sehingga kontribusinya cenderung meningkat. Termasuk di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, meskipun terjadi penurunan volume konsumsi, namun penurunan konsumsi rumah tangga masih lebih kecil dibandingkan komponen lainnya.

Secara total, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan cenderung berfluktuasi dari 4,11 persen (2018), kemudian mengalami perlambatan menjadi 3,86 persen (2019). Pada tahun berikutnya (2020), adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya kontraksi di semua aspek perekonomian, termasuk pada konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhannya turun hingga minus 1,49 persen. Pasca pandemi Covid-19, seiring dengan aktivitas perekonomian pada tahun 2021 yang mulai bergeliat pulih kembali, konsumsi rumah tangga juga mulai tumbuh positif sebesar 4,80 persen. Pertumbuhan ini bisa dijaga dengan baik sehingga pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 4,62 persen.

Secara umum pertumbuhan konsumsi total ADHK selaras dengan pertumbuhan konsumsi per kapita. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita pada tahun 2018 sebesar 3,50 persen, kemudian sedikit mengalami perlambatan menjadi 3,24 persen pada tahun 2019, dan semakin turun menjadi 0,00 persen pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan kembali laju pertumbuhan konsumsi per kapita hingga mencapai 4,42 persen (2021) dan 4,25 persen (2022). Kenaikan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh kembali pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat dan pelonggaran, bahkan penghapusan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah.

Peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara "riil" jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah dua persen. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan volume tingkat konsumsi per kapita atau tingkat kemakmuran masyarakat secara makro, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB.

Secara rata-rata selama tahun 2018-2022, konsumsi per rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19. Rata-rata rumah tangga di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 menghabiskan dana sekitar 66,46 juta rupiah selama setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 70,26 juta rupiah (2019); 70,59 juta rupiah (2020); 75,48 juta rupiah (2021); dan 82,34 juta rupiah (2022). Sementara itu, atas dasar harga konstan 2010 selama periode 2018-2022 rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh 3,00 persen per tahun, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,42 persen dan terendah di tahun 2020, di mana pada saat itu terjadi kontraksi sebesar -0,38 persen akibat pandemi Covid-19.

Tabel 3.8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,82	34,51	36,33	36,76	37,09
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,41	3,40	3,45	3,43	3,36
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,86	8,76	9,19	9,47	9,34
d. Kesehatan & Pendidikan	5,32	5,24	5,65	5,54	5,32
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	23,76	24,15	20,33	19,64	20,45
f. Hotel & Restoran	18,66	18,75	19,47	19,57	18,94
g. Lainnya	5,17	5,19	5,59	5,61	5,50
Total Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Perkembangan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan

rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Selama periode 2018-2022 rata-rata konsumsi per kapita secara “riil” meningkat dengan laju pertumbuhan pada kisaran 0,00 sampai dengan 4,42 persen. Akibat penurunan daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga mencapai 0,00 persen. Perubahan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada Tabel 3.8.

Secara umum, struktur konsumsi akhir rumah tangga dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 34,82 persen (2018); 34,51 persen (2019); 36,33 persen (2020); 36,76 persen (2021); dan 37,09 persen (2022). Meningkatnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan berdampak pada menurunnya proporsi untuk konsumsi bukan makanan. Pada kelompok pengeluaran bukan makanan, konsumsi tertinggi terjadi pada subkomponen transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yang berada pada kisaran 20 hingga 24 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga. Sedangkan yang terendah berada pada subkomponen pakaian dan alas kaki yang hanya berada pada kisaran tiga persen. Kondisi ini dikarenakan pengeluaran untuk pembelian pakaian dan alas kaki oleh sebagian besar rumah tangga biasanya hanya bersifat insidental atau hanya pada saat momen-momen tertentu.

Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran makanan selama empat tahun terakhir (2019-2022) menunjukkan kecenderungan naik. Selama periode pandemi Covid-19, masyarakat lebih cenderung meningkatkan konsumsi makanan dan suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh. Sementara itu, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan juga tak kalah menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan berfluktuasi, dengan nilai masing-masing sebesar 4,54 persen (2018); 4,31 persen (2019); -3,91 persen (2020); 4,19 persen (2021); dan 5,55 persen (2022). Bangkitnya kembali perekonomian masyarakat pada tahun 2022 pasca dihantam pandemi Covid-19 mendorong

pertumbuhan konsumsi bukan makanan melesat sebesar 5,55 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya tingkat perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

Tabel 3.9. Pertumbuhan Riil Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo 2018-2022
(persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,33	3,02	3,06	5,87	3,00
Non Makanan	4,54	4,31	-3,91	4,19	5,55
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,15	2,82	-0,91	3,39	2,65
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,52	3,46	2,51	4,29	2,84
d. Kesehatan & Pendidikan	3,34	2,97	5,43	1,83	1,92
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,80	5,33	-13,20	4,20	10,37
f. Hotel & Restoran	3,98	4,08	0,93	3,91	2,54
g. Lainnya	4,18	3,84	4,96	7,51	4,66
Total Konsumsi Rumah Tangga	4,11	3,86	-1,49	4,80	4,62

Sementara itu tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.10 menunjukkan peningkatan harga setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara umum selama periode 2018-2022 peningkatan harga (inflasi) relatif masih terkendali. Peningkatan harga pada total konsumsi rumah tangga sebesar: 3,63 persen (2018); 2,42 persen (2019); 0,85 persen (2020); 2,41 persen (2021); dan 4,61 persen (2022). Pertumbuhan implisit sebesar 4,61 persen yang terjadi pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Angka tersebut dipicu oleh melesatnya pertumbuhan implisit kelompok makanan yang cukup tinggi sebesar 7,21 persen. Sementara itu pada kelompok konsumsi non-makanan, subkelompok perumahan, perkakas,

perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga menyumbang pertumbuhan implisit tertinggi, yakni 4,98 persen. Subkelompok transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yang sempat mengalami pertumbuhan implisit negatif pada tahun 2020-2021, pada tahun 2022 sudah kembali pulih tumbuh positif sebesar 3,24 persen.

Tabel 3.10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

(persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,40	2,34	1,47	2,58	7,21
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,40	3,15	1,56	3,19	4,42
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,18	1,62	1,65	6,02	4,98
d. Kesehatan & Pendidikan	2,74	1,72	1,66	3,26	3,21
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,43	2,65	-3,64	-0,49	3,24
f. Hotel & Restoran	4,98	2,72	2,19	3,81	3,32
g. Lainnya	4,87	2,88	1,96	0,11	2,62
Total Konsumsi Rumah Tangga	3,63	2,42	0,85	2,41	4,61

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan dan lingkungan hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah seharusnya semakin dapat ditingkatkan lagi, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai PDRB wilayah tersebut. Berdasarkan Tabel 3.11 dapat ditunjukkan bahwa perkembangan proporsi pengeluaran lembaga non profit (LNPRT) terhadap total PDRB relatif masih stagnan.

**Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT
Kabupaten Probolinggo, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp.)	303,28	325,74	331,99	343,46	373,64
b. ADHK 2010 (Miliar Rp.)	181,09	190,63	191,74	196,69	207,39
c. Pertumbuhan Riil (%)	8,17	5,27	0,58	2,58	5,44
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	0,95	0,96	0,98	0,96	0,96

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Konsumsi LNPRT ADHB pada tahun 2018 sebesar 303,28 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 325,74 miliar rupiah (2019); 331,99 miliar rupiah (2020); 343,46 miliar rupiah (2021); dan 373,64 miliar rupiah (2022). Adapun pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan 2010 cenderung menunjukkan fluktuasi, berturut-turut adalah sebesar: 8,17 persen (2018), kemudian menurun menjadi 5,27 persen (2019), dan semakin terjun akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,58 persen. Meskipun terus mengalami penurunan, namun konsumsi LNPRT yang tetap mampu tumbuh positif di saat hampir seluruh aktivitas perekonomian ambruk terkena imbas pandemi Covid-19 pada tahun 2020, menunjukkan bahwa aktivitas dan peranan LNPRT tetap mampu dijaga sehingga dapat bertahan dan tetap tumbuh positif. Selanjutnya pada tahun 2021, konsumsi LNPRT mampu bangkit kembali ke angka 2,58 persen, dan semakin membaik pada tahun 2022 hingga mampu tumbuh 5,44 persen. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas LNPRT sudah kembali normal sebagaimana sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Memang jika dibandingkan dengan tahun 2018, pertumbuhannya masih kalah tinggi. Hal tersebut karena pada tahun 2018 ada kegiatan pemilihan kepala daerah serta dimulainya persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tentunya berimbas pada pengeluaran yang cukup besar bagi partai politik yang merupakan bagian dari LNPRT.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, di mana ciri-ciri barang privat adalah: a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); serta c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri-ciri: a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; dan b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.095,36 miliar rupiah; kemudian berturut-turut untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 2.278,18 miliar rupiah (2019); 2.103,73 miliar rupiah (2020); 2.184,45 miliar rupiah (2021); dan 2.186,03 miliar rupiah (2022). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan perkembangan yang sama selama periode 2018-2022. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara riil juga telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas, kecuali pada tahun 2020.

Apabila dicermati lebih lanjut, proporsi sumbangan pengeluaran akhir pemerintah terhadap perekonomian Kabupaten Probolinggo cenderung semakin mengecil. Sepanjang periode tersebut hanya terjadi peningkatan proporsi di tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu dari 6,55 persen (2018) menjadi 6,70 persen (2019). Selanjutnya sejak tahun 2020 hingga 2022, proporsinya berangsur-angsur menurun, dari 6,24 persen (2020); 6,14 persen (2021); hingga 5,61

persen (2022). Adanya pandemi Covid-19 disertai krisis ekonomi global menyebabkan pemerintah harus melakukan penghematan dan refocusing anggaran pada upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Tabel 3.12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp.)	2.095,36	2.278,18	2.103,73	2.184,45	2.186,03
b. ADHK 2010 (Miliar Rp.)	1.197,42	1.253,90	1.215,04	1.219,14	1.265,58
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6,55	6,70	6,24	6,14	5,61
Rata-rata konsumsi per Kapita/tahun (Ribu Rp.)					
a. ADHB	1.803,09	1.948,66	1.826,68	1.889,83	1.884,57
b. ADHK 2010	1.030,40	1.072,54	1.055,03	1.054,72	1.091,05
Pertumbuhan:					
a. Total konsumsi Pemerintah	2,49	4,72	-3,10	0,34	3,81
b. Per Kapita	1,88	4,09	-1,63	-0,03	3,45
Jumlah Penduduk (<i>jiwa</i>)	1.162.092	1.169.101	1.151.672	1.155.894	1.159.965

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktiknya, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan fluktuasi. Hal ini juga diikuti dengan fluktuasi pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2018, konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.803,09 ribu rupiah. Angka tersebut kemudian mengalami kenaikan menjadi 1.948,66 ribu rupiah pada tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, di mana pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 yang meruntuhkan semua sendi perekonomian termasuk pemerintah, rata-rata konsumsi pemerintah juga ikut tergerus menjadi 1.826,68 ribu rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021-2022, seiring dengan aktivitas pemulihan

ekonomi, angka tersebut sedikit meningkat menjadi 1.889,83 ribu rupiah (2021) dan 1.884,57 ribu rupiah (2022).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya fluktuasi nilai sepanjang tahun 2018-2022. Diawali dengan nilai 1.030,40 ribu rupiah (2018), rata-rata konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 sempat meningkat menjadi 1.072,54 ribu rupiah (2019), namun kemudian terus menurun menjadi 1.055,03 ribu rupiah (2020) hingga 1.054,72 ribu rupiah (2021) akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2022, nilainya kembali naik menjadi 1.091,05 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita secara kuantitas pada tahun 2022.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan total konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 4,72 persen. Sedangkan kontraksi terdalam terjadi pada tahun berikutnya, yaitu sebesar -3,10 persen. Adapun pada tahun 2022, konsumsi total pemerintah tumbuh positif sebesar 3,81 persen. Sejalan dengan konsumsi totalnya, apabila dilihat dari perkembangan pertumbuhan per kapitanya selama tahun 2018-2022, pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 4,09 persen. Sementara kontraksi terdalam terjadi pada tahun berikutnya, yaitu sebesar -1,63 persen. Adapun pada tahun 2022, pertumbuhan per kapitanya sudah kembali ke jalur positif menjadi 3,45 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda, hal tersebut dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital), selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor. Fungsi kapital adalah sebagai *input* tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan komponen PMTB pada penghitungan PDRB pengeluaran tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data pada Tabel 3.13 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang dampaknya masih dirasakan hingga tahun 2021, tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan PMTB ini. Pertumbuhan PMTB pada tahun 2018 mencapai 7,02 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi perlambatan meskipun masih positif, yakni 4,90 persen, dan kemudian semakin menurun akibat kontraksi ekonomi dampak pandemi Covid-19 menjadi -4,64 persen (2020) dan -0,42 persen (2021). Geliat aktivitas perekonomian yang perlahan-lahan mulai pulih kembali pada tahun 2022 mampu mendorong PMTB tumbuh positif sebesar 3,85 persen. Pertumbuhan PMTB yang cukup tinggi pada tahun 2018 disebabkan oleh banyaknya aktivitas pembangunan konstruksi pada saat itu, utamanya yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jalan tol, serta dipengaruhi juga oleh peningkatan pembentukan modal dalam bentuk ternak, mesin, dan kendaraan bermotor.

**Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Probolinggo, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	9.130,96	9.834,85	9.517,56	9.707,78	10.441,74
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	6.415,04	6.729,34	6.416,88	6.389,66	6.635,70
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	28,52	28,91	28,22	27,26	26,82
Struktur PMTB (ADHB)					
a. Bangunan (Miliar Rp.)	5.512,55	6.008,27	5.788,92	5.987,92	6.502,80
(%)	60,37	61,09	60,82	61,68	62,28
b. Non Bangunan (Miliar Rp.)	3.618,41	3.826,58	3.728,64	3.719,86	3.938,94
(%)	39,63	38,91	39,18	38,32	37,72
Total PMTB (Miliar Rp.)	9.130,96	9.834,85	9.517,56	9.707,78	10.441,74
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%):					
a. Bangunan	7,77	5,76	-4,62	0,74	4,62
b. Non Bangunan	6,02	3,73	-4,67	-2,03	2,75
Total PMTB	7,02	4,90	-4,64	-0,42	3,85

Apabila ditinjau lebih detail lagi, tren pertumbuhan dari masing-masing komponen PMTB relatif sama dengan pertumbuhan totalnya. Pertumbuhan subkomponen bangunan maupun non bangunan mempunyai pola yang relatif sama dengan pertumbuhan PMTB secara total. Pada tahun 2018, pertumbuhan subkomponen bangunan sebesar 7,77 persen, kemudian melambat namun masih positif sebesar 5,76 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, PMTB subkomponen bangunan berkontraksi hingga pertumbuhannya menjadi -4,62 persen. Pada tahun 2021-2022, pertumbuhan PMTB subkomponen bangunan berangsur-angsur berhasil pulih ke jalur positif menjadi 0,74 persen (2021) dan 4,62 persen (2022). Pola yang hampir sama juga ditunjukkan oleh PMTB subkomponen non bangunan. Diawali pada tahun 2018 yang tumbuh cukup tinggi sebesar 6,02 persen, kemudian terus mengalami perlambatan menjadi 3,73 persen (2019), selanjutnya terpuruk karena berkontraksi sebesar -4,67 persen (2020) dan -2,03 persen (2021) akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, PMTB subkomponen non bangunan berhasil tumbuh positif kembali sebesar 2,75 persen.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak dapat banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

**Tabel 3.14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Probolinggo, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	116,38	121,76	56,94	94,93	100,01
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	70,10	72,34	33,47	54,51	55,90
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,36	0,36	0,17	0,27	0,26

Pada tahun 2018, perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 116,38 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 121,76 miliar rupiah. Pada tahun 2020, lesunya aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan total inventori menjadi hanya 56,94 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021-2022 kembali terjadi peningkatan nilai perubahan inventori menjadi 94,93 miliar rupiah (2021) dan 100,01 miliar rupiah (2022).

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Probolinggo mengalami sedikit fluktuasi. Selama rentang waktu 2018-2019, proporsi perubahan inventori sebesar 0,36 persen terhadap total PDRB. Namun pada masa pandemi Covid-19, sebagian besar unit produksi mengalami penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan ketersediaan stok barang menjadi rendah. Tentu saja hal tersebut berdampak pada menurunnya perubahan inventori. Pada puncak masa pandemi Covid-19 (tahun 2020), proporsi perubahan inventori berada di titik terendah, yakni hanya 0,17 persen terhadap total PDRB. Upaya-upaya penanggulangan pandemi Covid-19 disertai pemulihan aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat membawa dampak positif pada peningkatan proporsi perubahan inventori hingga mencapai 0,27 persen (2021) dan 0,26 persen (2022).

3.2.6. Ekspor Netto Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Probolinggo, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu di kabupaten lain dalam satu provinsi, di provinsi lain, maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Sedangkan impor adalah kondisi sebaliknya. Dengan demikian, ekspor netto adalah nilai ekspor suatu wilayah dikurangi dengan nilai impornya. Karena keterbatasan data ekspor impor untuk wilayah kabupaten/kota, maka komponen ekspor netto masih diperlakukan sebagai penyeimbang.

Tabel 3.15. Perkembangan Ekspor Netto Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Netto					
a. ADHB (Miliar Rp)	-1.330,96	-1.627,26	-1.219,86	-1.335,53	-1.101,46
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1.007,05	-967,75	-835,52	-834,95	-837,85
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-4,16	-4,78	-3,62	-3,75	-2,83

Secara total dalam kurun waktu 2018-2022 besaran ekspor netto barang dan jasa selalu menunjukkan nilai negatif, yang berarti bahwa nilai ekspor masih lebih kecil dibandingkan nilai impornya. Pada tahun 2018 nilai ekspor netto barang dan jasa atas dasar harga berlaku sebesar -1.330,96 miliar rupiah. Kemudian berturut-turut pada tahun 2019 sebesar -1.627,26 miliar rupiah; tahun 2020 sebesar -1.219,86 miliar rupiah; tahun 2021 sebesar -1.335,53 miliar rupiah; dan pada tahun 2022 senilai -1.101,46 miliar rupiah.

Sejalan dengan nilai ekspor netto atas dasar harga berlaku, nilai ekspor netto barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga terus menunjukkan nominal negatif dengan tingkat kecepatan yang berfluktuasi. Nilai ekspor netto barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 tahun 2018 sebesar -1.007,05 miliar rupiah; tahun 2019 sebesar -967,75 miliar rupiah; tahun 2020 sebesar -835,52 miliar rupiah; tahun 2021 sebesar -834,95 miliar rupiah; serta tahun 2022 sebesar -837,85 miliar rupiah. Sementara itu pada periode 2018-2022, proporsi nilai ekspor netto terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi dari -4,16 persen (2018); -4,78 persen (2019); -3,62 persen (2020); -3,75 persen (2021); dan -2,83 persen (2022). Angka ini tentu berkaitan dengan kecepatan perkembangan besaran selisih nilai ekspor dan impor dibandingkan seluruh komponen PDRB.

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN PROBOLINGGO 2018-2022

BAB IV

<https://probolinggokab.bps.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Probolinggo, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp.)					
a. ADHB	32.012,21	34.013,66	33.721,07	35.605,52	38.932,78
b. ADHK 2010	22.374,57	23.395,25	22.898,24	23.664,39	24.734,19
PDRB per Kapita (Ribu Rp.)					
a. ADHB	27.547,05	29.093,86	29.280,10	30.803,45	33.563,75
b. ADHK 2010	19.253,70	20.011,32	19.882,60	20.472,80	21.323,22
Pertumbuhan Riil PDRB per Kapita (%)	3,85	3,93	-0,64	2,97	4,15
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.162.092	1.169.101	1.151.672	1.155.894	1.159.965
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,60	0,60	-1,49	0,37	0,35

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui pergerakan PDRB per kapita Kabupaten Probolinggo dari tahun ke tahun yang seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Indikator tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk suatu wilayah rata-rata mampu

menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita pada masing-masing waktu (tahun) tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga cenderung meningkat di kisaran dua sampai empat persen, kecuali pada tahun 2020 yang berkontraksi hingga -0,64 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2018 mencapai 3,85 persen dan meningkat menjadi 3,93 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sebagaimana dijelaskan sebelumnya terjadi kontraksi PDRB per kapita sehingga tumbuh negatif -0,64 persen. Kemudian pada tahun 2021-2022, PDRB per kapita mampu kembali tumbuh positif sebesar 2,97 persen (2021) dan 4,15 persen (2022). Pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan selalu diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk. Selama kurun waktu 2018-2022, pertumbuhan penduduk meningkat rata-rata pada kisaran 0,35 hingga 0,60 persen. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2. PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara nilai produk yang dikonsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah di wilayah domestik dengan total PDRB yang tercipta. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Probolinggo (sekitar 67 hingga 69 persen), artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Probolinggo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Data yang disajikan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, produk yang digunakan untuk total konsumsi akhir sebanyak 75,27 persen dari total PDRB yang tercipta. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya proporsi konsumsi akhir domestik terhadap PDRB berturut-turut sebesar 75,51 persen (2019); 75,22 persen (2020); 76,22 persen (2021); dan 75,75 persen (2022). Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Selama periode 2018-2022 proporsi

perbandingan konsumsi akhir terhadap total PDRB yang tercipta menunjukkan kecenderungan fluktuatif namun masih relatif tetap pada kisaran tiga per empat terhadap total PDRB.

Tabel 4.2. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp.)					
a. Rumah Tangga	21.697,20	23.080,39	22.930,71	24.610,45	26.932,82
b. LNPRT	303,28	325,74	331,99	34ADHB 3,46	373,64
c. Pemerintah	2.095,36	2.278,18	2.103,73	2.184,45	2.186,03
Jumlah	24.095,83	25.684,31	25.366,43	27.138,36	29.492,49
PDRB ADHB (Miliar Rp)	32.012,21	34.013,66	33.721,07	35.605,52	38.932,78
Proporsi (%)	75,27	75,51	75,22	76,22	75,75

4.3. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Netto". Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor, maka yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Probolinggo dengan luar wilayah (kabupaten/negara) selama periode 2018-2022 selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menggambarkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Probolinggo cenderung dalam posisi defisit. Selama tahun 2018-2022 defisit perdagangan Kabupaten Probolinggo tercatat sebesar -1.330,96 miliar rupiah (2018); -1.627,26 miliar rupiah (2019); -1.219,86 miliar rupiah (2020); -1.335,53 miliar rupiah (2021); dan -1.101,46 miliar rupiah (2022).

**Tabel 4.3. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kabupaten Probolinggo, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor Netto ADHB (Miliar Rp)	-1.330,96	-1.627,26	-1.219,86	-1.335,53	-1.101,46
Nilai Ekspor Netto ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1.007,05	-967,75	-835,52	-834,95	-837,85
Rasio Ekspor Netto Terhadap PDRB	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-0,03

Sementara rasio ekspor netto terhadap total PDRB cenderung stagnan selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 rasio ekspor netto terhadap PDRB mencapai -0,04. Kemudian pada tahun 2019 menjadi -0,05, selanjutnya kembali lagi sebesar -0,04 pada tahun 2020-2021, dan menjadi -0,03 pada tahun 2022.

4.4. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak *k* unit. Formulasnya sebagai berikut.

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 4.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kabupaten Probolinggo, 2018-2022**

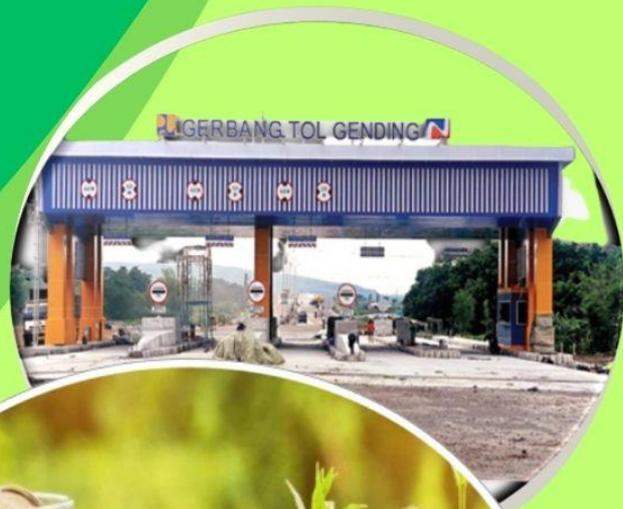
Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	22.374,57	23.395,25	22.898,24	23.664,39	24.734,19
Perubahan (Miliar Rp)	956,33	1.020,68	-497,01	766,15	1.069,81
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rp)	6.415,04	6.729,34	6.416,88	6.389,66	6.635,70
ICOR	6,71	6,59	-12,91	8,34	6,20

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa selama periode 2018-2022 besaran ICOR cenderung berfluktuasi. Diawali dari 6,71 (2018), kemudian sedikit menurun menjadi 6,59 pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai ICOR Kabupaten Probolinggo menjadi -12,91 sebagai akibat aktivitas ekonomi yang berkontraksi di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 nilai ICOR kembali positif, yakni sebesar 8,34 dan kemudian kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 6,20. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa laju peningkatan produksi domestik di wilayah Kabupaten Probolinggo masih didominasi oleh faktor permintaan dari luar wilayah/negeri dan berkaitan dengan sektor-sektor yang padat modal sehingga membutuhkan belanja modal/kapital yang lebih mahal.

PENUTUP

BAB V

<https://probolinggokab.bps.go.id>



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Probolinggo pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi, seperti jumlah penduduk dan rumah tangga, sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sehingga lebih mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain, seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Probolinggo terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

<https://probolinggokab.bps.go.id>



**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

Komponen	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21.697,20	23.080,39	22.930,71	24.610,45	26.932,82
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7.555,34	7.965,50	8.330,34	9.046,94	9.990,39
	b. Pakaian dan Alas Kaki	740,36	785,23	790,22	843,01	903,61
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.923,26	2.022,02	2.107,18	2.329,68	2.515,21
	d. Kesehatan dan Pendidikan	1.154,40	1.209,04	1.295,82	1.362,59	1.433,31
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.154,50	5.572,88	4.661,42	4.833,37	5.507,13
	f. Hotel dan Restoran	4.048,13	4.327,89	4.463,85	4.815,16	5.101,43
	g. Lainnya	1.121,20	1.197,82	1.281,87	1.379,71	1.481,73
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	303,28	325,74	331,99	343,46	373,64
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.095,36	2.278,18	2.103,73	2.184,45	2.186,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	9.130,96	9.834,85	9.517,56	9.707,78	10.441,74
	a. Bangunan	5.512,55	6.008,27	5.788,92	5.987,92	6.502,80
	b. Non Bangunan	3.618,41	3.826,58	3.728,64	3.719,86	3.938,94
5	Perubahan Inventori	116,38	121,76	56,94	94,93	100,01
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.330,96	-1.627,26	-1.219,86	-1.335,53	-1.101,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		32.012,21	34.013,66	33.721,07	35.605,52	38.932,78

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)**

Komponen	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.517,98	16.116,79	15.876,63	16.639,34	17.407,46
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5.435,60	5.599,78	5.771,24	6.110,15	6.293,63
	b. Pakaian dan Alas Kaki	553,95	569,56	564,37	583,48	598,96
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.487,72	1.539,24	1.577,95	1.645,58	1.692,36
	d. Kesehatan dan Pendidikan	745,56	767,67	809,37	824,18	839,98
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.976,61	4.188,54	3.635,74	3.788,58	4.181,31
	f. Hotel dan Restoran	2.509,37	2.611,76	2.636,05	2.739,17	2.808,88
	g. Lainnya	809,17	840,24	881,92	948,18	992,34
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	181,09	190,63	191,74	196,69	207,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.197,42	1.253,90	1.215,04	1.219,14	1.265,58
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	6.415,04	6.729,34	6.416,88	6.389,66	6.635,70
	a. Bangunan	3.690,26	3.902,92	3.722,56	3.750,06	3.923,41
	b. Non Bangunan	2.724,78	2.826,41	2.694,31	2.639,60	2.712,30
5	Perubahan Inventori	70,10	72,34	33,47	54,51	55,90
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.007,05	-967,75	-835,52	-834,95	-837,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		22.374,57	23.395,25	22.898,24	23.664,39	24.734,19

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67,78	67,86	68,00	69,12	69,18
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,60	23,42	24,70	25,41	25,66
	b. Pakaian dan Alas Kaki	2,31	2,31	2,34	2,37	2,32
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,01	5,94	6,25	6,54	6,46
	d. Kesehatan dan Pendidikan	3,61	3,55	3,84	3,83	3,68
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	16,10	16,38	13,82	13,57	14,15
	f. Hotel dan Restoran	12,65	12,72	13,24	13,52	13,10
	g. Lainnya	3,50	3,52	3,80	3,87	3,81
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,95	0,96	0,98	0,96	0,96
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,55	6,70	6,24	6,14	5,61
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	28,52	28,91	28,22	27,26	26,82
	a. Bangunan	17,22	17,66	17,17	16,82	16,70
	b. Non Bangunan	1,30	11,25	11,06	10,45	10,12
5	Perubahan Inventori	0,36	0,36	0,17	0,27	0,26
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-4,16	-4,78	-3,62	-3,75	-2,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2022 (Persen)**

Komponen	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,11	3,86	-1,49	4,80	4,62
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,33	3,02	3,06	5,87	3,00
	b. Pakaian dan Alas Kaki	3,15	2,82	-0,91	3,39	2,65
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,52	3,46	2,51	4,29	2,84
	d. Kesehatan dan Pendidikan	3,34	2,97	5,43	1,83	1,92
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,80	5,33	-13,20	4,20	10,37
	f. Hotel dan Restoran	3,98	4,08	0,93	3,91	2,54
	g. Lainnya	4,18	3,84	4,96	7,51	4,66
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,17	5,27	0,58	2,58	5,44
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,49	4,72	-3,10	0,34	3,81
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	7,02	4,90	-4,64	-0,42	3,85
	a. Bangunan	7,77	5,76	-4,62	0,74	4,62
	b. Non Bangunan	6,02	3,73	-4,67	-2,03	2,75
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,47	4,56	-2,12	3,35	4,52

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2022**

Komponen	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	139,82	143,21	144,43	147,91	154,72
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	139,00	142,25	144,34	148,06	158,74
	b. Pakaian dan Alas Kaki	133,65	137,87	140,02	144,48	150,86
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	129,28	131,36	133,54	141,57	148,62
	d. Kesehatan dan Pendidikan	154,84	157,49	160,10	165,33	170,64
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	129,62	133,05	128,21	127,58	131,71
	f. Hotel dan Restoran	161,32	165,71	169,34	175,79	181,62
	g. Lainnya	138,56	142,56	145,35	145,51	149,32
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	167,47	170,87	173,15	174,62	180,16
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	174,99	181,69	173,14	179,18	172,73
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	142,34	146,15	148,32	151,93	157,36
	a. Bangunan	149,38	153,94	155,51	159,68	165,74
	b. Non Bangunan	132,80	135,39	138,39	140,93	145,23
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		143,07	145,39	147,26	150,46	157,40

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Pengeluaran Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2022 (Persen)**

Komponen	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,63	2,42	0,85	2,41	4,61
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,40	2,34	1,47	2,58	7,21
	b. Pakaian dan Alas Kaki	4,40	3,15	1,56	3,19	4,42
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,18	1,62	1,65	6,02	4,98
	d. Kesehatan dan Pendidikan	2,74	1,72	1,66	3,26	3,21
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,43	2,65	-3,64	-0,49	3,24
	f. Hotel dan Restoran	4,98	2,72	2,19	3,81	3,32
	g. Lainnya	4,87	2,88	1,96	0,11	2,62
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,57	2,03	1,33	0,85	3,17
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,09	3,83	-4,70	3,49	-3,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3,89	2,68	1,49	2,43	3,57
	a. Bangunan	4,49	3,05	1,02	2,68	3,80
	b. Non Bangunan	2,87	1,95	2,22	1,83	3,05
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,28	1,62	1,29	2,17	4,62

*) = Angka Sementara

**) = Angka Sangat Sementara

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten the Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Jl. Raya Lumajang km. 05 Sumbertaman Probolinggo

Telp. (0335) 422117; Email: bps3513@bps.go.id

Homepage: probolinggokab.bps.go.id